
COLLABORATIVE GOVERNMENT HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN BUDIDAYA UDANG BERBASIS KAWASAN

Dimas Bayu Setiawan¹, Denok Kurniasih², Tobirin³,

^{1,2,3} Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

Email: dimas.bayu.s@mhs.unsoed.ac.id¹, denok.kurniasih@unsoed.ac.id², tobirin@unsoed.ac.id³

Abstrak

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kolaborasi ini didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.

Kata Kunci: Udang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Abstract

The development of region-based shrimp cultivation emerges as a primary agenda in the context of the relationship between the central and regional governments. This phenomenon marks a paradigm shift from conventional approaches towards closer cooperation and collaboration between the two levels of government. Essentially, collaborative government becomes a crucial key in designing policies that ensure a balance between central needs and local aspects in the development of the shrimp cultivation sector. The research method used is a literature review. The research results indicate that the ethics of collaboration are based on transparency and accountability, ensuring that policies and actions reflect public interests. Community involvement, resource optimization, and handling conflicts of interest are the core of this ethics, maintaining harmony between the government and the public and ensuring the sustainability of responsible shrimp cultivation. The research findings in the Indramayu District emphasize the importance of collaboration in realizing the sustainability of coastal areas based on vaname shrimp cultivation.

Keywords: Shrimp, Central Government, Local Government

PENDAHULUAN

Pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mengemuka sebagai agenda utama dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Fenomena ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional ke arah kerjasama dan kolaborasi yang lebih erat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. Pada intinya, collaborative government menjadi kunci penting dalam merancang kebijakan yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan pusat dan aspek lokal dalam pembangunan sektor budidaya udang.

Hubungan yang etis antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ini, penelitian ini memfokuskan diri untuk mendalami dinamika kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan budidaya udang berbasis kawasan. Aspek etika menjadi sorotan utama, ditekankan pada dampaknya terhadap kepentingan publik serta keberlanjutan lingkungan. Analisis mendalam terhadap interaksi antara kedua tingkatan pemerintahan ini diharapkan dapat mengungkap prinsip-prinsip etis yang menggerakkan pembangunan berkelanjutan di sektor budidaya udang. Pembangunan berperan sebagai pendorong perubahan di berbagai sektor, tidak terbatas pada aspek pertumbuhan ekonomi, dan hal ini terkait dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan masing-masing. Terkadang, pihak-pihak terkait tersebut mengalami tumpang tindih dalam kepentingan mereka satu sama lain, menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan dan target pembangunan. Untuk mengatasi konflik kepentingan, kerjasama atau kolaborasi dianggap sebagai salah satu solusi utama, khususnya dalam konteks pembuatan kebijakan pembangunan.

Pemerintah daerah memegang peran penting sebagai pelaksana tugas pemerintahan di tingkat lokal, yang mencakup hak, wewenang, dan kewajiban di setiap daerah. Tugas utamanya adalah mengatur dan menangani berbagai urusan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan isu-isu strategis di wilayahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Interaksi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi esensial dalam menciptakan sinergi dan koordinasi, memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sejalan dengan visi dan misi nasional. Saling ketergantungan antara pemerintah pusat dan daerah menciptakan kerangka kerja yang dinamis dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah daerah menjadi landasan penting dalam mendukung kesinambungan dan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan (Putri, 2022).

Penegasan pemerintah yang terdapat dalam dokumen negara tersebut tidak dilakukan tanpa alasan yang jelas. Mayoritas penduduk di 8 kecamatan dan 25 desa Kabupaten Tangerang berlokasi di kawasan pesisir. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat yang bergantung pada aktivitas perikanan, baik perikanan tambak maupun perikanan tangkap. Dengan jumlah penduduk sekitar 273.991 jiwa yang menggeluti profesi sebagai nelayan, sektor perikanan menempati peringkat ketiga setelah buruh dan pertanian (PKSPL IPB, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kehidupan masyarakat sangat terkait dengan hasil alam dan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dan laut. Meskipun demikian, potensi kelautan dan sumberdaya pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Tangerang masih belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga banyak nelayan yang mengalami ketertinggalan dalam aspek ekonomi (Fadli & Nurlukman, 2018).

Kebijakan publik merupakan hasil dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah perilaku individu atau kelompok sosial guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini terdiri dari serangkaian peraturan, umumnya bersifat kompleks, yang ditetapkan dengan maksud mencapai tujuan tertentu dari suatu kebijakan. Kebijakan publik dianggap sebagai tindakan yang sengaja dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab, dengan tujuan memengaruhi perilaku masyarakat. Selama proses perumusan kebijakan, terdapat upaya untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin aspek yang terkena dampak kebijakan, dengan harapan mengurangi kemungkinan timbulnya dampak yang tidak diinginkan (Amanta & Kusumasari, 2019).

Sebagai salah satu negara penghasil dan pengeksport komoditas perikanan utama di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing dalam industri ini. Hal ini dapat diperkuat oleh fakta bahwa secara geografis, lebih dari 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari lautan, terdapat lebih dari 17 ribu pulau, dan garis pantai yang membentang seluas 81 ribu km². Selama periode tahun 1997 hingga 2007, sub-sektor perikanan Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari US\$ 1,6 miliar per tahun dan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,1% setiap tahunnya. Indonesia memiliki fokus ekspor pada dua jenis komoditas utama, yaitu udang dan kelompok ikan laut seperti tuna, cakalang, dan tongkol. Pada periode 1998-2000, misalnya, udang menjadi penyumbang devisa terbesar, dengan total nilai ekspor udang mencapai US\$ 840.000.000 hingga akhir tahun 2002. Keseluruhan nilai ekspor sektor perikanan Indonesia mencapai US\$ 1 miliar per tahun sejak awal krisis pada tahun 1997 hingga tahun 2000, menunjukkan peningkatan sekitar 50%-60% dari total nilai ekspor perikanan setiap tahunnya, dengan kontribusi besar dari ekspor udang (Sudirman, 2013).

Sumber daya pesisir mencakup aspek hayati (seperti ikan, terumbu karang, dan mangrove), non-hayati (seperti mineral), dan juga jasa lingkungan. Keunggulan komparatif dari sumber daya pesisir terletak pada ketersediaannya dalam jumlah yang besar, beragam jenisnya, serta kekayaan laut tropis. Sumber daya pesisir menjadi salah satu kekayaan alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, penggunaannya saat ini kurang memperhatikan aspek kelestarian, yang berdampak pada penurunan fungsi, kualitas, dan keanekaragaman hayati yang ada. Sebagai contoh, terjadi degradasi ekosistem terumbu karang yang telah teridentifikasi sejak tahun 1990-an (Fajriansyah & Darma, 2017).

Dari segi normatif, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga aspek utama, yaitu dimensi perikanan dan ekosistemnya, dimensi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat, dan dimensi kebijakan perekonomian. Hingga saat ini, fokus lebih banyak tertuju pada dimensi kedua dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. Ekosistem yang menjadi lingkungan bagi sumber daya tersebut belum mendapatkan perhatian sebagaimana seharusnya, sehingga hasilnya adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya tersebut (Sukarniati & Khoirudin, 2017).

Budidaya udang mengalami perubahan signifikan sejak awal tahun 2012, dengan fokus utama pada komoditas udang vaname. Selama periode tersebut, terjadi transformasi dalam teknologi budidaya udang vaname, mengubah pendekatan dari metode tradisional plus menjadi metode intensif dengan tujuan meningkatkan produktivitas udang vaname. Budidaya udang dengan pendekatan intensif dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang sangat produktif, memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan penerimaan devisa negara. Meskipun demikian, keberlanjutan dari kegiatan ini sangat tergantung pada legitimasi yang diberikan oleh dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami secara mendalam dan merinci dampak lingkungan yang mungkin timbul

sebagai akibat dari pertumbuhan budidaya udang yang intensif (Dwi Putri Wigiania et al., 2019).

Tujuan penelitian mengenai Collaborative Government dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan budidaya udang berbasis kawasan sangat luas dan dapat dibagi menjadi beberapa dimensi yang relevan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami sejauh mana kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam konteks pembangunan budidaya udang. Hal ini melibatkan penelusuran tingkat kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar-pihak terkait di tingkat pusat dan daerah. Kedua, tujuan penelitian ini melibatkan pemahaman lebih dalam terkait dengan aspek etika dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pembangunan budidaya udang. Ini mencakup penilaian terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan budidaya udang. Pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan aktif mereka diharapkan dapat menjadi poin utama dalam aspek etika ini.

METODE PENELITIAN

Metode literature review merupakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian tertentu. Pertama-tama, peneliti melakukan identifikasi sumber literatur yang sesuai dengan tujuan penelitian melalui basis data akademis, perpustakaan digital, dan sumber-sumber referensi lainnya. Proses ini mencakup pemilihan kata kunci yang tepat dan pencarian dokumen-dokumen yang relevan. Setelah sumber-sumber literatur teridentifikasi, peneliti melibatkan langkah evaluasi untuk memilih kualitas literatur yang akan dimasukkan dalam review. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap validitas metodologi penelitian, keakuratan informasi, dan relevansi dengan topik penelitian. Dalam tahap ini, peneliti juga dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan (gaps) yang dapat menjadi fokus penelitian lebih lanjut.

Langkah selanjutnya adalah mensintesis informasi dari literatur yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengelompokan temuan-temuan utama, pengidentifikasian pola atau tren tertentu, dan penarikan kesimpulan terkait dengan topik penelitian. Penting untuk menciptakan narasi yang koheren dan logis untuk menyajikan temuan-temuan tersebut. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh (Knopf, 2009) yang menyebutkan bahwa literature review setidaknya harus memiliki dua elemen kunci. *Pertama*, harus mampu merangkum secara ringkas temuan atau klaim yang telah muncul dari obyek penelitian sebelumnya. *Kedua*, harus mampu menyimpulkan seberapa akurat dan lengkapnya pengetahuan tersebut, dan harus mampu menyajikan penilaian tentang apa yang benar, salah, meyakinkan atau tidak, dan apa yang hilang dalam literatur yang ada.

Dalam metode literature review, integritas akademis menjadi aspek penting. Oleh karena itu, peneliti harus mencatat dengan cermat sumber-sumber literatur yang digunakan, menyertakan kutipan dengan benar, dan menghindari plagiat. Pemilihan sumber literatur juga harus mencakup beragam perspektif untuk memastikan representasi yang seimbang dan komprehensif terhadap topik. Metode literature review bukan hanya sekadar ringkasan dari sumber-sumber literatur, melainkan juga refleksi kritis terhadap kontribusi setiap sumber terhadap pemahaman topik penelitian. Dengan demikian, metode ini memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan kerangka konseptual dan merancang penelitian yang lebih lanjut. Keseluruhan, metode literature review adalah instrumen esensial untuk memahami perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan, dan menyusun dasar untuk penelitian masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Collaborative government, dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan budidaya udang berbasis kawasan, merupakan pendekatan yang mendorong adanya sinergi dan koordinasi antara dua tingkatan pemerintahan tersebut. Dalam prakteknya, hal ini membutuhkan kerjasama yang erat, komunikasi yang efektif, dan pertukaran informasi yang transparan. Aspek kunci dari pendekatan ini adalah transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi landasan etika dalam menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Transparansi mencakup keterbukaan informasi terkait kebijakan, alokasi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara jelas bagaimana program pembangunan budidaya udang dijalankan dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Akuntabilitas, sementara itu, menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka. Ini menciptakan dasar etika yang kuat dalam hubungan pemerintah.

Dalam implementasi program pembangunan budidaya udang, perhatian terhadap kepentingan publik menjadi esensial. Hal ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat lokal dan stakeholder terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi pilar utama dalam aspek etika collaborative government ini. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan ruang bagi suara masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal.

Dalam upaya menjaga etika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, peran keduanya juga mencakup penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Keterlibatan langsung dan konsultasi dengan masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan budidaya udang berbasis kawasan tidak hanya memenuhi kepentingan pemerintah, tetapi juga mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan demikian, collaborative government tidak hanya menjadi alat efektif untuk pengembangan budidaya udang, tetapi juga sebagai mekanisme etis yang memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan publik.

Pentingnya kolaborasi juga dapat dilihat dari perspektif optimalisasi sumber daya. Dalam konteks budidaya udang, pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan dan air, menjadi faktor krusial. Dengan adanya kerjasama, pemerintah pusat dan daerah dapat mengoordinasikan upaya untuk memastikan keberlanjutan budidaya udang tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, transparansi dalam alokasi sumber daya, penegakan regulasi, dan monitoring yang ketat perlu diutamakan.

Aspek etika juga mencakup penanganan konflik kepentingan dan pencegahan korupsi. Pemerintah pusat dan daerah harus menjalankan tugasnya dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan publik. Pembangunan budidaya udang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk menciptakan kerangka kerja yang adil, transparan, dan etis dalam pengelolaan pembangunan budidaya udang berbasis kawasan.

Dengan demikian, collaborative government dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan budidaya udang berbasis kawasan perlu

memperhatikan nilai-nilai etika yang mendasari setiap keputusan dan tindakan. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan menjaga harmoni antara kepentingan pusat dan daerah serta antara manusia dan lingkungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Dwi Putri Wigiania et al., 2019) bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tercermin melalui penilaian status keberlanjutan kawasan pesisir di Kecamatan Indramayu, yang menjadi fokus kegiatan budidaya udang vaname. Kecamatan ini, sebagai bagian dari Kabupaten Indramayu, menghadirkan potensi besar dalam kontribusi produksi udang vaname melalui berbagai teknologi budidaya, baik yang bersifat tradisional maupun intensif. Penelitian menggunakan metode analisis Rap - Shrimp Farm (Rap-SF) yang telah dimodifikasi dari RAPFISH, dengan mempertimbangkan lima dimensi, yaitu ekologi, ekonomi, sosial, hukum dan kelembagaan, serta teknologi. Melalui pendekatan ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah tercermin dalam upaya bersama untuk mengevaluasi dan memahami dampak kegiatan budidaya udang vaname terhadap keberlanjutan kawasan pesisir di Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status keberlanjutan kawasan pesisir, terutama terkait dengan teknologi budidaya, mengalami variasi. Indeks keberlanjutan untuk kawasan pesisir dengan teknologi tradisional plus dikategorikan sebagai kurang berkelanjutan, sementara untuk teknologi intensif dikategorikan cukup berkelanjutan. Dalam konteks kolaborasi, temuan penelitian ini memberikan dasar untuk merekomendasikan strategi pengelolaan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname. Rekomendasi tersebut mencakup perlunya pendekatan pengelolaan kawasan budidaya yang berfokus pada klusterisasi, yang melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan status keberlanjutan kawasan pesisir dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

Penelitian lain oleh (Denok Kurniasih et al., 2017) juga menyebutkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* perlu dilakukan guna menciptakan program yang basisnya merupakan dari masyarakat sehingga hasilnya akan sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui diskusi kelompok dengan para *stakeholder* serta wawancara secara mendalam dengan pihak terkait dalam program SLBM. Model *collaborative* juga dinilai memiliki nilai lebih karena akan memperkuat sistem dan akan memperjelas peran para *stakeholder* sehingga pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang baik.

KESIMPULAN

Collaborative Government dalam pembangunan budidaya udang berbasis kawasan mempromosikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui kerjasama erat, komunikasi efektif, dan transparansi. Etika kolaborasi ini berakar pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik. Keterlibatan masyarakat, optimalisasi sumber daya, dan penanganan konflik kepentingan menjadi inti dari etika ini, sehingga menjaga harmoni antara pemerintah dan masyarakat serta memastikan keberlanjutan budidaya udang yang bertanggung jawab. Temuan penelitian di Kecamatan Indramayu secara konkret menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam mewujudkan keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanta, L., & Kusumasari, B. (2019). Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta Actor Intervention in Influencing Environmental Policy Formulation: The Case Study of Shrimp Farming Relocation Policy in Yogya. *Jurnal Borneo Administrasi*, 15(2), 179–198.
- Denok Kurniasih, Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). *Collaborative Governance Dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas*. 19, 1–7.
- Dwi Putri Wigiania, B. W., Soewardia, K., & Taryono. (2019). Status keberlanjutan kawasan pesisir berbasis budidaya udang vaname di kecamatan indramayu. *Journal of Fisheries and Marine Research*, 3(2), 144–154.
- Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1, 517–529.
- Fajriansyah, & Darma, D. C. (2017). Upaya Pengelolaan Potensi Kelautan Berbasis Integrated Coastal Zone Management (ICZM) di Kampung Kasai Kepulauan Derawan Efforts to Management of Marine Based Potential Integrated Coastal Zone Management (ICZM) At Kasai village of Derawan Islands. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 1, 134–142.
- Knopf, J. (2009). Knopf. *University of Leicester*, 127–132.
- Putri, R. A. (2022). POLITIK EKOWISATA: STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN WISATA PESISIR DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PANTAI Abstrak Abstrak. *JurnalDinamikaPemerintahan*, 5(1), 37–53.
- Sudirman, I. (2013). Empowering Local Capacity dalam Meningkatkan Industri Udang Lokal di Kabupaten Bulungan Irsyad Sudirman Dosen Fisip Universitas Kaltara. *Jurnal Independence Hubungan Internasional*, 1(3), 236–252.
- Sukarniati, L., & Khoirudin, R. (2017). Jurnal Ekonomi Pembangunan Analisis Kelembagaan Penerapan Konsep Blue Economy pada Tambak Udang (Studi Kasus di Dusun Ngentak Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 52–65.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
